

BERITA FOTO FRAKSI PKS DPR RI



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**





Serahkan Bantuan Untuk Korban Bencana di NTT

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyerahkan secara simbolik bantuan pada perwakilan Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dari hasil pemotongan gaji Anggota DPR RI Fraksi PKS dan didampingi pengurus BPW Santri.





Silaturahmi Kebangsaan PKS dan PPP

Jakarta -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan 7 poin kesepahaman yang dihasilkan dalam diskusi Silaturahmi Kebangsaan antara PKS dan PPP di Gedung MD Building DPP PKS, Rabu (14/04/2021).

"Sebagai partai Islam tertua di Indonesia, kiprah dan kontribusi PPP sudah sangat panjang bagi umat dang bangsa. Begitu pun dengan PKS sebagai partai Islam yang lahir dari rahim reformasi. Dalam Silaturahmi ini telah disepakati 7 poin kesepahaman antara PKS dan PPP," jelas Habib Aboe.

Habib Aboe menyebutkan sebagai partai yang turut serta dalam membangun bangsa PKS dan

PPP berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara.

"Pertama berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila dari ancaman komunisme, terorisme, radikalisme, separatisme, sekularisme dan berbagai ancaman lainnya. Selain itu yang kedua juga akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi dalam bentuk kerja sama politik di ranah konstestasi politik maupun kebijakan publik," tutur Habib Aboe.

Sebagai partai Islam, keduanya juga berkomitmen untuk mengajak umat Islam di Indonesia serta hadir dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.





Terima Aspirasi Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi

Jakarta (03/04) --- Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dan masukan dari Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi yang dilakukan secara daring, Selasa, (06/04/2021).

Ketua Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi, Berlian Santosa, dalam paparan aspirasinya mengatakan beberapa program dan kegiatan telah dilakukan untuk membantu dalam membangun Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi. Namun sejauh ini, hanya menjadi penonton dan tak banyak dilibatkan dalam program nasional.

"Beberapa program telah kami buat untuk membangun Ekonomi Kreatif di Jambi, hanya saja perlu ada support dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menggarap dan menyelesaikan program nasional. Harapan kami jangan

jadikan kami hanya penonton saja, akan tetapi libatkan kami untuk menghandle acara bersama bukan sekedar penonton," ungkap Barlian Santosa.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah saat menyambut aspirasi dari Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi mengatakan, saat ini pelaku ekonomi kreatif sudah mulai memiliki sudut pandang yang bagus, terutama bagi produk yang seharusnya memiliki nilai tambah.

"Ekraf termasuk baru dalam dunia birokrasi meski Undang-undang sudah beberapa tahun, harus mengubah paradigma karena menangani ekraf harus memahami ekosistem ekonomi kreatifnya dari hulu sampai hilir dengan pendekatan utama karya yang dapat

didaftarkan hak kekayaan intelektualnya", ungkap Ledia.

Ledia menambahkan, kekurangan yang ada dalam birokrasi kita adalah kolaborasi, jadi perlu usaha untuk menyamakan, seperti halnya di departemen industri yang memiliki satu bidang khusus ekonomi kreatif.

"Idealnya... Kalau dalam Undang-undang itu kita mendorong adanya kolaborasi antar bidang, karena ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan dan berdiri sendiri. Ekonomi kreatif itu harus digarap lintas sektor. Dan saya akan juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan dari Jambi, untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan tim ekonomi kreatif," tutup Ledia.

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



Hadiri Bimtek 2021, Anggota Legislatif PKS Se Sumbagut

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA menjadi narasumber BIMTEK 2021 Anggota Legislatif PKS DPRD Se-Sumatera Bagian Utara."Meningkatkan kapasitas Anggota Legislatif Agar Siap Mengemban Amanah, Melayani dan Membela Rakyat"



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA



Rakerwil PKS Banten, Ketua Fraksi PKS DPR Serahkan Kendaraan Layanan PKS

Banten (11/4) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS Banten yang dilaksanakan di Kota Serang pada Ahad 11 April 2021.

Pada Kesempatan tersebut Jazuli juga menyerahkan bantuan



berupa kendaraan operasional dalam rangka peningkatan pelayanan PKS kepada masyarakat.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi



SEBAGAI BENTUK NEGARA, BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI BOYAN NEGARA.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI S. E.

ANGGOTA DPR/MPR RI DARI KALIMANTAN SELATAN
BANJAR April 2021

akar15

akar Al-Habsyi

Sosialisasi dapil di Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar (10/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi kembali mengingatkan pentingnya mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Habib Aboe ini dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (09/04/2021).

"Kita harus kedepankan persatuan dan kesatuan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kalimantan Selatan. Hal ini penting untuk diingatkan dalam upaya menjaga keamanan dan suasana kondusif di Kalimantan selatan",

papar Anggota MPR RI dari dapil Kalimantan Selatan 1 tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang harus di hormati.

"Soal PSU ini adalah putusan MK yang harus kita hormati dan kita laksanakan. Hal ini adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Disini diperlukan kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara, yaitu dengan sikap terus menjaga kerukunan diantara para warga, itu adalah nilai penting dari pilar kebangsaan," papar Anggota Komisi III tersebut.

"Memang setiap PSU memiliki

potensi pergesekan antar kelompok masyarakat di lapangan. Namun saya memiliki keyakinan bahwa warga banua akan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas persoalan apapun, termasuk Pilkada ini", terang Ketua MKD tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang provokatif atau tindakan yang berpeluang memicu konflik akibat PSU ini.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi



Sambangi Nangroe

Disela sela kunjungan Komisi III DPR RI dengan para mitra di Nangroe Aceh Darrusalam (NAD), tak lupa Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyempatkan waktu untuk bertemu dengan pengurus DPW PKS Aceh Ustadz Makhyar



H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.



Gotong Royong Bangun Rumah Warga

NTB (15/4) -- Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama melakukan Gotong royong bersama warga untuk membongkar dan membangun kembali rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Di desa kelayu utara kecamatan Selong, kabupaten lombok Timur

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.



Narasumber Dusrenbang Provinsi NTB

NTB (15/4) -- Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Suryadi Jaya Purnama menghadiri sebagai narasumber pada agenda musrenbang Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tersebut Suryadi menyebutkan, Perlu kreatifitas pemerintah daerah di

masa pandemi untuk mencapai target-target pembangunan. Selain kreatifitas juga perlu koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti DPR RI sebagai wakil daerah di pusat.

Dr. H. Mardani, M.Eng



Kunjungan Reses Ke Sekolah Berkuda dan Tempat Pemeliharaan Kuda

Jakarta (15/4) -- Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI I Mardani Ali Sera melakukan Kunjungan reses di Sekolah Berkuda dan Tempat Pemeliharaan Kuda di JIEP Pulomas



Dr. H. Mardani, M.Eng



Kunjungi Pusat Vaksinasi di Pulomas

Jakarta (15/4) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapi DKI I Mardani Ali Sera melakukan kunjungan reses ke salah satu pusat vaksinasi Pulomas Jaktim Investa Medika Asia bekerjasama dengan RS Mayapada untuk ikut membantu Kemenkes menyalurkan vaksin pada mereka yang lansia dan tenaga kependidikan



Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Kunjungan Kerja Komisi VII Ke TekMIRA di Bandung

Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, DR.H. Mulyanto, M.Eng. dari fraksi PKS mengunjungi Puslit Teknologi Minerba, Kementerian ESDM di Bandung, 10 April 2021.

Hasil kajian TekMIRA di bawah komando Dirjen Minerba terkait hilirisasi mineral tembaga

menyimpulkan, bahwa pembangunan smelter tembaga secara bisnis menguntungkan. Karenanya bila ada perusahaan tambang tembaga yang tidak mau menjalankan amanat UU untuk membangun smelter, itu lebih pada political will yang rendah.



Kunjungan Kerja Komisi VII Ke PT Pindad

Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, DR.H. Mulyanto, M.Eng. dari fraksi PKS mengunjungi PT. PINDAD di Bandung, 10 April 2021.

Pindad mampu memproduksi tank, senapan, cyber security, termasuk engineering lainnya. Produk senjata Pindad beberapa kali menjadi juara dalam lomba tembak

di Australia. BUMN ini terus memperoleh profit. Masalah utamanya adalah bahan baku besi baja ataupun komponen elektronik untuk grade militer masih belum mampu diproduksi di Indonesia, sehingga TKDN produksinya masih belum maksimal.

Dr. H. Mulyanto, M.Eng



Kunker Spesifik Smelter Nikel

Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, DR.H. Mulyanto, M.Eng. anggota Fraksi PKS mengunjungi Smelter Nikel di Cikande, Serang, Banten, 6 April 2021. Pabrik dibangun selama 2 tahun dengan tenaga lokal.

"Artinya kita bisa membangun

smelter kalau kita mau. Namun kenapa PT. Freeport selalu mangkir soal ini?," sindir Mulyanto.

Hadir dalam acara ini Pimpinan Komisi VII DPR RI dan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.

Dr. Hermanto, S.E., M.M



Hadiri kegiatan Open House Balitbu dan Peringatan International Fruits and Vegetable Years 2021 di Aripan

Padang (10/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Pemerintah agar melakukan pendampingan serta membuka pasar domestik dan internasional bagi produk buah tropika. Terlebih produk paska panen buah agar petani mendapatkan nilai tambah.

"Dengan nilai tambah, berupa harga yang lebih tinggi dan tentu keuntungan yang lebih besar, tentu akan membuat petani senang dan

bersemangat menanam dan merawat buah secara berkelanjutan," ujar Hermanto.

Pemerintah, lanjutnya, mempunyai instansi yang bisa memberikan pendampingan kepada petani buah yaitu Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) yang berlokasi di Aripan, Kabupaten Solok. "Produk tanaman buah tropika unggul yang dikembangkan oleh Balitbu hendaknya disebarluaskan ke masyarakat agar terjadi

peningkatan produktivitas dan mutu tanaman buah dengan standar kualitas untuk ekspor," papar legislator dari FPKS DPR ini.

Kedepan secara bertahap, lanjutnya, tanaman buah yang tersebar ditengah masyarakat hendaknya memiliki standar yang sama seperti yang dikembangkan di kebun yang dikelola Balitbu.

"Petani buah harus mendapatkan nilai tambah yang maksimum baik kualitas maupun kuantitasnya," tandas Hermanto.

Dr. Hermanto, S.E., M.M



Beri sambutan dalam Kegiatan Ekspose Seminar Nasional Inovasi dan Inovasi Pertanian (EKSISTA) 2021

Jakarta (08/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menyebutkan, temuan teknologi baru dibutuhkan untuk mengatasi banyak kendala pembangunan pertanian.

Menurut Hermanto, Kendala pembangunan pertanian antara lain meliputi semakin sempitnya lahan, semakin berkurangnya sumberdaya manusia, jumlah penduduk terus meningkat, derasnya impor pangan dan perubahan iklim.

"Temuan teknologi dan

modernisasi mekanisasi pertanian sangat dibutuhkan untuk menekan biaya dan menghemat waktu sehingga produktivitas pertanian meningkat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," papar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan Ekspose Seminar Nasional Inovasi dan Inovasi Pertanian (EKSISTA) 2021 yang diselenggarakan oleh

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Sumatera Barat di Sukarami, Solok, (07-08/04/2021).

Menurut Hermanto, temuan teknologi dan modernisasi mekanisasi pertanian merupakan bidang garapan BPTP.

"Karena itu saat ini dan masa datang BPTP memiliki peran strategis untuk riset dan pengembangan pertanian," ucap legislator dari FPKS DPR ini.



Adakan Teknologi Pembibitan untuk Kelestarian Ikan Bilih

Padang (13/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan, populasi ikan bilih di Danau Singkarak terus mengalami penurunan.

Hermanto meminta pemerintah agar mendedikan teknologi pembibitan sebagai salahsatu upaya mengatasi semakin langkanya populasi ikan endemik di danau tersebut.

"Dukungan teknologi pembibitan dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk memulihkan populasi ikan bilih. Pulihnya populasi ikan bilih dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar danau," papar Hermanto.

Masyarakat sekitar danau, lanjutnya, banyak yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan di Danau Singkarak.

"Kalau ikan bilih punah maka otomatis masyarakat tersebut kehilangan mata pencaharian," ucap legislator dari FPKS DPR ini.

"Pemerintah perlu mendirikan Bilih Center untuk menjaga dan memastikan kelestarian populasi ikan bilih," usul Hermanto.

Belum lama ini rombongan Komisi IV DPR didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto berkunjung ke Danau Singkarak. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR melepas

bibit ikan ke danau. Selain itu menyerahkan bantuan modal kerja kepada komunitas perikanan Sumatera Barat.

"Bantuan modal kerja tersebut semoga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi komunitas perikanan Sumatera Barat," ujar Hermanto.

Selain mengunjungi Danau Singkarak, rombongan Komisi IV didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berkunjung juga ke Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) yang berlokasi di Arian, Kabupaten Solok.

Dr. Hermanto, S.E., M.M



Berkunjung ke Gudang Bulog Sumatera Barat di Rawang, Kota Padang

Jakarta (14/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Bulog Sumatera Barat menyerap beras petani lokal sebanyak-banyaknya di musim panen raya sekarang ini untuk kemudian dijual secara komersial. Langkah tersebut penting agar harga beras tidak jatuh saat panen raya.

"Stabilitas harga penting guna menjamin kesejahteraan petani. Sebaliknya, harga yang turun apalagi jatuh tentu akan sangat memukul petani," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurutnya, petani itu produsen pangan bangsa Indonesia. "Mereka harus dibuat senang agar tetap bersemangat mengelola usaha taninya untuk mencukupi pangan bangsa Indonesia. Dengan demikian pangan kita tidak terlalu tergantung pada impor," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto juga meminta Bulog agar menyediakan dan menjaga stok pangan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri dalam jumlah yang cukup dengan harga yang stabil.

"Hal ini penting agar kaum muslimin bisa tenang dalam menjalankan berbagai ibadah sepanjang bulan Ramadhan. Tidak terganggu oleh kenaikan harga pangan," paparnya.

Belum lama ini rombongan Komisi IV DPR berkunjung ke Gudang Bulog Sumatera Barat di Rawang, Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR meninjau stok beras di gudang tersebut dan menemukan masih tersimpan beras impor tahun 2018. Komisi IV meminta beras impor 2018 itu

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si



Kunjungan Kerja BAKN DPR RI Ke Unibraw Malang

Selasa 6 April 2021 — Anis Byarwati, Wakil Ketua BAKN DPR RI mengikuti Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Malang, Jawa Timur. Kunjungan ini dalam rangka mendapatkan masukan para nara



sumber dari Universitas Brawijaya Malang, terkait permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si



Webinar Forum Jurnalis Ekonomi dan Bisnis (FORJES)

Jakarta (09/04) --- Forum Jurnalis Ekonomi dan Bisnis (FORJES) menyelenggarakan Webinar yang mengangkat tema 'Rencana Merger Pegadaian-BRI: Ketika Kultur Nasabah yang Berbeda Terancam Sirna'.

Tema yang sedang menjadi polemik publik terkait rencana Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tentang holding PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani atau PNM menjadi anak perusahaan di bawah PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Dalam Webinar ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati dengan tegas mengatakan bahwa, Holding Ultra Mikro- BRI, Pegadaian dan PNM bukan jawaban

untuk peningkatan UMKM.

Webinar yang juga menghadirkan sosok ekonom Prof. Faisal Basri dan Piter Abdullah ini berlangsung interaktif dengan banyak pertanyaan dari para pemirsa yang kebanyakan menanyakan apakah proses holding ini benar-benar akan terwujud dan apakah akan berdampak positif bagi masyarakat khususnya UMKM.

Anis yang juga politisi senior dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengawali paparannya dengan mempertanyakan apakah holding ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau bahkan melenceng dari ekonomi Pancasila.

Mengutip Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, alinea 4 yang berbunyi bahwa tujuan bernegara adalah untuk 'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'.

Serta falsafah ekonomi Negara Indonesia dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi 'Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang'.

H. Rofik Hananto, S.E



Gelar Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Purbalingga (09/04) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengajak para guru untuk aktif menulis.

Menurut Rofik, menulis adalah pintu pembuka peradaban baru, bahkan di dunia bisnis pun kemampuan menulis sangat dibutuhkan.

"Salah satu ciri negara yang mempunyai peradaban tinggi adalah tingkat literasinya bagus, diantaranya menulis dan membaca. Hari ini Indonesia adalah negara dengan tingkat literasi terendah ke-2 di dunia. Ini sangat miris sekali," katanya.

Rofik mengatakan hal itu saat membuka Pelatihan Penyusunan

Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Guru SMA sederajat di Ballroom Halalmart BC 3 Purbalingga, Jumat (09/04).

Dia menambahkan, dulu orang menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi yang tidak bisa menjangkai cakupan yang lebih luas. dan menulis menjadi perpindahan zaman berburu dan nomaden dengan zaman menetap.

"Sebagai guru dituntut untuk menyiapkan anak didik sebaik mungkin dalam menghadapi masa depan. Guru harus menyiapkan anak didik untuk mampu bertarung di masa depan," kata Rofik di depan para guru yang berasal dari Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu.



Dia mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai bonus demografi dengan usia produktif yang mencapai 24 persen atau 85 juta penduduk Indonesia. Jika mereka tidak disiapkan sedari sekarang maka ke depan mereka akan menjadi beban negara.

"Karena itu saya menilai kemampuan literasi, kemampuan menulis itu penting. Jika negara sudah membiasakan masyarakatnya berliterasi maka kebiasaan itu akan berkembang menjadi sebuah budaya literasi. Akan ada buku di setiap tempat dan setiap waktu," ujarnya.

H. Johan Rosihan, S.T.



Serahkan Bantuan FPKS dan Komisi IV DPR RI untuk korban banjir di Bima

Bima, NTB (07/04) — Anggota Fraksi PKS Dapil Nusa Tenggara Barat Johan Rosihan mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat.

Johan tiba di lokasi menjelang maghrib setelah penerbangan sempat tertunda lebih dari 45 menit. Bakda sholat maghrib, Menyampaikan bantuan secara simbolik di tiga titik pemukiman

warga, Desa Rato, Liu dan Sanolo.

Berikutnya, Besama struktur PKS akan memberikan layanan kesehatan di 5 titik. Karena warga mulai mengeluhkan gatal gatal beberapa hari pasca banjir.

Selain menyerahkan bantuan atas nama Fraksi PKS, Johan juga menyampaikan bantuan atas nama Komisi IV.



H. Johan Rosihan, S.T.



Hari Kedua di NTT

Jam 4 dini hari kami berangkat dari Maumere dan jam 8 pagi tiba di larantuka . Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan melalui kapal cepat dari pelabuhan larantuka menuju ke pulau Adonara.

Setiba disana kami langsung ke posko Induk PkS melayani rakyat di desa waywerang. Disana sudah ada ketua DPW PKS NTT Pak Anwar Hajra dan Tim.

Kami melanjutkan perjalanan ke posko bantuan desa Lamahala kecamatan Adonara Barat Flores a Timur untuk mwnyerahkan 30 paket peralatan masak.

Karena alhamdulillah bantuan sembako dll sudah cukup banyak

baik dari pemerintah mau pun lembaga sosial kemanusiaan yang banyak berdatangan ke sana.

Selanjutnya kami menuju ke Mesjid Babur Rahman di desa Waybura salah satu desa terparah terdampak banjir.setelah sholat dzuhur berjamaah kamj memberikan bantuan genset kepada pengurus mesjid, agar pelaksanaan Ibadah dapat berjalan baik, aliran listrik dan air masih terputus.

Balik ke posko PKS melayani utk makan siang dengan beberapa tokoh masyarakat setempat.





Sebar 1.000 Paket Ikan di Sukabumi

Sukabumi (09/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet membagikan 1.000 paket ikan di wilayah Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.

Program bernama Safari Gerakan Makan Ikan ini merupakan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

Pembagian paket ikan ini salah satunya digelar di halaman kantor Dewan Pengurus Daerah atau DPD PKS Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cisaat, Jumat, (09/04/2021).

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan,

mendukung penurunan stunting, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein, serta menyalurkan pada masyarakat untuk menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan," kata Slamet kepada media.

Legislator asal Sukabumi ini menuturkan bantuan sebanyak 1.000 paket ikan yang akan disebar di wilayah Kabupaten Sukabumi ini merupakan upaya untuk mencapai target nasional, yakni setiap orang mengonsumsi 60 kilogram ikan di tahun 2021.

"Kalau mau cerdas idealnya seperti di Jepang 140 kilogram. Target kita nasional di angka 60 kilogram per orang untuk



mengonsumsi ikan. Sehingga kalau di Sukabumi yang disebut tadi oleh Pak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di angka 25 kilogram itu masih di bawah rata-rata nasional," jelasnya.

"Sementara potensinya kita mau bicara darat melimpah, mau bicara laut juga tersedia, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita semua bagaimana pemerintah menjalankan ini," tambahnya.

Dalam Safari Gerakan Makan Ikan ini Slamet secara simbolis menyerahkan paket ikan kepada masyarakat yang hadir.



Berkunjung ke Kampung Cipatuguran, Palabuhanratu, Sukabumi

Sukabumi (07/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, berharap nasib nelayan dapat lebih sejahtera dan pemerintah hadir untuk memberdayakan profesi ini.

Hal itu dikatakannya saat berkunjung ke Kampung Cipatuguran, Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Dalam kunjungan di Hari Nelayan Nasional, 6 April 2021 ini, Slamet meminta Pemerintah serius memberdayakan nelayan agar kehidupan mereka bisa lebih baik.

Slamet juga mengaku terus

memikirkan program apa yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan ini.

"Saya mengucapkan selamat Hari Nelayan Nasional. Mudah-mudahan nelayan kita atas adanya fungsi negara, bisa semakin berdaya," katanya kepada awak media.

Legislator Senayan asal Sukabumi ini menjelaskan bahwa beberapa program yang saat ini tengah dibahas bersama Dewan Pengurus Daerah atau DPD PKS Kabupaten Sukabumi untuk kesejahteraan nelayan adalah asuransi nelayan dan pemberdayaan istri-istri mereka.

"Saya juga akan terus mendorong bagaimana lahir program pemerintah yang sifatnya padat karya. Sebab itu akan memberdayakan nelayan," katanya.

"Seperti di Sukabumi, program yang tertunda adalah perubahan samudera dan masukan lain dari nelayan yang juga akan kita dorong."

Dalam kesempatan ini Slamet juga memberikan sejumlah bingkisan kepada para nelayan sebagai bentuk empati untuk kehidupan mereka.



Rapat bersama Kementerian Pertanian



Jakarta (06/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pejabat di Kementerian Pertanian dan Dirut Pupuk Indonesia agar mundur jika pada tahun ini persoalan distribusi pupuk tetap semrawut.

Hal itu dikatakan Slamet saat mengikuti rapat bersama Kementerian Pertanian, Senin, (05/04/2021).

"Saya ingin mendapat pernyataan di mana pada 2020 distribusi pupuk sangat semrawut

yang menyebabkan petani kita menderita. Kalau di tahun ini terjadi lagi, saya ingin meminta komitmen pejabat di sini untuk mundur karena tidak ada lagi perubahan," tegas Slamet.

Legislator asal Sukabumi ini mengatakan bahwa pada rapat tanggal 5 Oktober 2020 lalu terdapat salah satu kesimpulan yang juga meminta Kementerian Pertanian agar melakukan kajian terkait efektifitas pemberian subsidi pupuk untuk dialihkan menjadi subsidi pasca panen.

"Sudah sejauh mana kajian itu dilakukan. Ini penting untuk memberikan rekomendasi berikutnya," kata Slamet.

Slamet juga mengingatkan soal data harga eceran tertinggi atau HET pupuk yang tidak diberikan secara rinci kepada DPR. Padahal dalam konteks pengawasan, data tersebut sangat diperlukan untuk bisa diketahui oleh publik.

"Tidak ada yang sifatnya tertutup karena perlu diketahui publik. Kalau keberatan alasannya disampaikan," pungkasnya.

Hj. Nevi Zuairina



Hadiri Peletakan Batu Pertama Sekolah Dhuafa di Pasaman Barat

Pasaman Barat (06/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah yang menyediakan pendidikan usia dini gratis bagi putra-putri Nagari Kaji yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Nevi dengan semangat ingin memajukan pendidikan merata di wilayah Sumatera Barat sangat mendukung aktivitas pendidikan ini karena upayanya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Sumbar secara menyeluruh.

Sekolah bernama Raudhatul Atfal Kasih ibu ini didirikan sejak 1 Januari 2013 dibawah naungan yayasan Kasih Ibu. Pendidikan gratis bagi dhuafa dan anak Yatim setiap

tahunnya menampung 30 orang peserta didik.

Legislator asal Sumatera Barat II ini sangat gembira dengan dilakukan peletakan batu pertama artinya saran pendidikan ini sudah dimiliki sendiri.

Karena sebelumnya, lanjutnya, tempat proses belajar mengajar selama ini menggunakan satu petak rumah warga yang di sewa per tahun.

"Saya berharap, dengan dimilikinya sarana pendidikan ini oleh yayasan, kedepannya semakin berkembang dan para SDM nya semakin bersemangat. Saya akan turut berupaya untuk berkontribusi sekuatnya sehingga pendidikan di sumpar ini terus berkembang secara



merata hingga ke pelosok-pelosok", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menerangkan, persiapan gedung milik sendiri ini hasil berawal dari hibah yayasan akan sebidang tanah sejak Januari 2013. Akhir Februari 2021 ada bantuan dari lembaga milik pemerintah pusat sebesar 10 juta rupiah.

Hj. Nevi Zuairina



Kunspek Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero)

Padang (08/04) --- Anggota DPR RI asal Sumbar, Nevi Zuairina menanggapi pelaksanaan pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin ketika kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT Utama Karya (Persero) di Sumatera Barat meminta agar para pelaku UMKM diberikan porsi strategis pada rest area yang akan dibangun sepanjang jalan Tol ini.

"Saya Minta UMKM ini nantinya mendapat tempat strategis di setiap rest area yang dibangun sepanjang jalan Tol. Ini akan menjadi etalase yang sangat bagus mencitrakan pemerintah sangat berpihak pada UMKM dan rakyat kecil. Sehingga para pelaku UMKM tidak perlu bersaing dengan para pengusaha

besar yang bila ini dibiarkan pasti para pelaku UMKM akan terpinggirkan", ujar Nevi.

Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diikuti politisi PKS ini merupakan fungsi pengawasan proyek besar pemerintah yang sangat strategis bagi proses percepatan pembangunan. Jalan tol Padang-Sicincin ini merupakan bagian dari jalan tol Padang-Pekanbaru yang mempunyai panjang total 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru.



Hj. Nevi Zuairina



Serap Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan

Pariaman (14/04) --- Legislator Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbang II, Nevi Zuairina terus melakukan silaturahmi bersama masyarakat di bulan penuh berkah ini.

Kebetulan masa reses persidangan IV tahun 2020-2021 berbarengan dengan bulan Ramadhan sehingga tema kunjungan pun menyesuaikan.

Dalam rangka reses dan temu warga ini, Nevi disambut hangat masyarakat Karena masyarakat hendak berdiskusi dan berdialog dengan wakil rakyatnya di pusat.

Demikian mendengar aspirasi dan melihat langsung kehidupan masyarakat, Nevi mengunjungi daerah-daerah sehingga mendapatkan informasi langsung

dari sumbernya.

Rabu (14/04/2021), setelah reses di Kuraitaji, Nevi melanjutkan perjalanan ke Aur Malintang.

Politikus perempuan ini berpesan bahwa dunia politik harus dijaga bersama untuk tetap 'bersih', dimulai dari individu masing-masing.

"Jika semua sudah mempunyai niat yang sama, maka InsyaAllah politik kita akan bersih. Jangan jadikan politik sebagai ladang pencari nafkah, yang nantinya berujung pada sebuah 'kepentingan'. Karena ketika kepentingan yang bukan untuk kepentingan publik memboncengi di dunia politik, maka kerusakan akan merambat dimana-mana dimulai dari regulasi hingga implementasinya di lapangan" ujar



H. Alifudin, S.E.,M.M



Sosialisasi Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana

Pontianak (06/04) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendukung Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana - BKKBN.

Dukungan tersebut disampaikan saat menyampaikan materi sosialisasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin, (05/04/2021)

Kegiatan Sosialisasi di hadirinya Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Koramil Pontianak Timur, Kapolsek Pontianak Timur, Lurah Saigon, dan peserta sosialisasi.

"Kita dukung bersama dan sukseskan bersama, dalam pendataan Keluarga tahun 2021, yang dilakukan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)" Ucap Alifudin pada saat penyampain materi.

Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Perumahan Royal Mansion, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.

Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April – 31 Mei.

Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

"Pembangunan dimulai dari



perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address, sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan" Ucap Arif Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, saat memberi sambutan.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Kunjungan Derah Pemilihan (Kundapil) Di Depok

Depok (05/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, dalam Kunjungan Derah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPR RI pada Ahad (28/03) di Kediaman Setyo Budi Leksono, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok.

Nur Azizah menyebutkan, seluruh ketua RT dan RW harus dilibatkan secara aktif dalam proses Verifikasi dan Validasi (Verivali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua RT dan RW di Kelurahan Sukamaju ini, Nur Azizah menjelaskan bahwa perlibatan Ketua RT dan RW ini harus dilakukan untuk menghasilkan DTKS yang representatif sehingga bantuan

sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sesuai dengan kriteria miskin yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial.

"Perlibatan RT dan RW dalam perbaikan DTKS ini juga dapat meringankan kinerja dinas, pak Ketua RT dan RW ini merupakan orang yang ditokohkan, dan lebih memahami kondisi masyarakatnya. Sehingga jika pendataan dilakukan dengan sungguh-sungguh melibatkan unsur-unsur dari mulai Camat, Lurah, RW dan RT, selain prosesnya lebih cepat, juga data yang dihasilkan lebih representatif. Tentu pak Ketua RT dan RW ini, sebagai unsur yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, harus



benar-benar amanah dalam mendataarganya", jelas Nur Azizah.

Menurut Nur Azizah, ketua RT dan RW merupakan bagian dari para pimpinan yang membimbing masyarakat. Sebagaimana dalam level keluarga, seorang bapak merupakan pemimpin dalam keluarga kecilnya.

Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Kundupil di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A, terima aspirasi Ketua RT dan RW yang masih mengeluhkan masalah DTKS. Hal itu disampaikan Irwan, salah satu Ketua RW di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, saat menghadiri acara Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundupil) Anggota DPR RI pada Ahad (28/3), di Kediaman M. Nur Hidayat, salah satu tokoh masyarakat di Cisalak, Sukmajaya, Depok. Di hadapan Nur Azizah, Irwan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 4.000 warga miskin di Kelurahan Cisalak masuk dalam waiting list atau daftar tunggu untuk masuk dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosisil (DTKS) di tahun 2021.

“DTKS saat ini masih harus dibenahi, banyak masyarakat yang datangnya tidak jelas namun masuk dalam DTKS. Dulu memang ketua RW di Cisalak ini pernah dilibatkan untuk mengajukan nama-nama masyarakat miskin yang akan masuk DTKS dalam muskel. Namun di Cisalak, hingga saat ini, masyarakat miskin yang waiting list masuk DTKS itu mencapai 4.000 dari total 17.000 jiwa warga Cisalak yang ada. Belum ada kejelasan terkait statusnya akan masuk kedalam DTKS atau tidak”, terang Irwan.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A.



Kunjungan ke Dapil Bekasi

Bekasi (13/04) --- Anggota DPR dari Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menyebutkan, bahwa salah satu upaya merefleksikan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan dan ulama di negeri ini.

Salah satunya Muhammad Natsir, yang pada tanggal 3 April 1950 berperan besar terhadap terbentuknya NKRI yang merupakan salah satu pilar negeri ini.

Hal itu disampaikan Nur Azizah pada Kamis (08/04/2021), dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI atau Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapiil).

"Kita tahu melalui KMB (Konferensi Meja Bundar), Belanda

memecah-mecah Indonesia menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), selanjutnya pada 3 April 1950, Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Partai Masyumi saat itu, di Parlemen RIS mengusulkan pembubaran RIS untuk Kembali menjadi NKRI. Melalui Mosi Integral Mohammad Natsir ini menunjukkan bahwa para tokoh muslim seperti Muhammad Natsir saat itu sangat berperan kuat dalam menjaga, menyatukan, serta menyelamatkan Indonesia dari perpecahan", papar Nur Azizah.

Dalam agenda yang dihadiri oleh perwakilan anggota organisasi pemuda kota Bekasi 'Gema Keadilan', Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro, Ketua DPD Gema Keadilan



Kota Bekasi, Muhammad Kamil, Sekretaris DPD Gema Keadilan Kota Bekasi, Haidi Priyatna.

Pada kesempatan ini Nur Azizah turut menyampaikan bahwa slogan Jas Merah dan Jas Hijau harus benar-benar diterapkan.

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen



Kunjungi
**KANAL RESMI
FRAKSI PKS DPR RI**

fraksi.pks.id



Website

fraksi.pks.id



Instagram

[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter

[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook

[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi.PKS.DPR.RI)



Youtube

[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)